

JURNAL

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENJUAL MINUMAN KERAS
OPLOSAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI KOTA YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh :
Erico Aldeo Hasanussy

NPM : **100510423**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Peradilan Pidana**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENJUAL MINUMAN KERAS
OPLOSAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI KOTA YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh :

Erico Aldeo Hasanussy

NPM : 100510423

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

- I. Penjatuhan Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta)
- II. Nama : Erico Aldeo Hasanussy, P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.
- III. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract, In this essay writing, the writer discussed issues on Criminal Punishment For Illegal Liquor Seller Who Makes People Dies in Yogyakarta. Until now illegal liquor has kill many peoples because the alcohol in the illegal liquor is not healthy for human consumed. The alcohol in illegal liquor used to be for medical, but some of peoples use the alcohol for make a liquor for human consumed. This research is aimed to know the judge's basic consederation, especially in deciding the verdict of guilty towards illegal liquor seller who makes people die. This research used library research to obtain the secondary data and field research to obtain the primary data by conducting interviews. This research was conducted in Yogyakarta State Court, Data obtained then was analyzed by comparing actual situation and data on positive criminal law and how law application valid for the ilegal liquor seller. Judge's basic consideration when deciding the verdict of guilty towards illegal liquor seller who makes people die are consideration of law and consideration of social.

Key Word : Criminal Punishment, Illegal Liquor Seller, Judge's Basic Consideration.

V. Pendahuluan

Generasi muda merupakan harapan masa depan bagi bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, generasi muda Indonesia mulai meniru kebudayaan dari luar Indonesia, berupa cara berpenampilan sampai dengan gaya hidup barat telah diterapkan oleh generasi muda sekarang ini. Namun, pengaruh ini tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi ada beberapa kebiasaan yang dinilai negatif atau tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Salah satunya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang saat ini banyak dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia.

Belakangan ini minuman keras yang beredar di kota tidak hanya minuman keras yang legal, tetapi juga banyak minuman keras ilegal termasuk minuman keras oplosan. Pada umumnya peminum minuman keras di kota Yogyakarta adalah mahasiswa. Sebagian besar peminum kelas pemabukan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Mengkonsumsi minuman keras dalam jumlah yang banyak dapat berdampak buruk bagi kesehatan, bahkan banyak yang kehilangan nyawa akibat mengkonsumsi minuman keras. Jenis minuman keras yang sering menyebabkan kematian adalah minuman keras oplosan.

Minuman keras oplosan dibuat dengan bahan yang seharusnya tidak dikonsumsi karena dapat membahayakan kesehatan, bahan yang digunakan seperti alkohol murni yang biasanya dipakai untuk membersihkan luka dicampur dengan gula halus, dan perasa makanan. Kadar alkohol murni yang digunakan dalam campuran minuman keras tradisional bermacam-macam, mulai dari yang berkadar alkohol rendah sampai yang kadar alkoholnya 96 %. Jenis alkohol yang aman dikonsumsi hingga jumlah tertentu adalah alkohol dengan 2 atom karbon atau *ethanol*, sementara alkohol yang sering dijadikan bahan untuk membuat minuman keras oplosan adalah alkohol dengan satu atom karbon atau *methanol* umumnya digunakan sebagai pelarut atau bahan bakar, sehingga sangat beracun jika diminum.

Mengonsumsi minuman keras ilegal yang tidak memiliki standar kesehatan sesuai dengan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tentu saja hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan peminum tersebut. Dalam hal ini penulis akan membahas minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian dalam hal penjatuhan pidana terhadap penjual. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.

Dalam ketentuan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengancam barangsiapa menjual barang yang bersifat membahayakan dan mengakibatkan kematian dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Dalam Ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga mengancam pelaku usaha yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dalam kenyataan, banyak pelaku penjual minuman keras oplosan hanya dijatuhi pidana ringan dan jauh dari ancaman Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh sebab itu penulis akan membahas lebih jauh mengenai apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian di Kota Yogyakarta?

VI. Isi Makalah

1. Pengertian Minuman Keras Oplosan

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol atau *ethanol* (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fersermentasi tanpa destilasi.

Minuman keras oplosan adalah minuman keras yang ditambahkan bahan-bahan sebagai perasa pada minuman keras. Bahan-bahan yang digunakan oleh pembuat minuman oplosan sangat tidak lazim untuk dikonsumsi.

2. Pengertian Pidana

Pengertian hukum pidana secara tradisional adalah “Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan”.

Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang yang melanggar ketentuan Undang-Undang tidak

hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

3. Pengertian Penjatuhan Pidana

Menurut Soedarto, pembedaan dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.

Penjatuhan pidana atau pembedaan berasal dari kata pidana yang diartikan pula sebagai hukuman. Penjatuhan pidana dapat diartikan pula sebagai penghukuman. “Apabila orang mendengar kata penghukuman, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana”.

4. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan

teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana penjara bagi terpidana akan memperhatikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan yang mengakibatkan kematian, studi kasus di Kabupaten Kota Yogyakarta adalah :

Dalam penjatuhan pidana, hakim tidak hanya menegakkan bunyi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang saja, melainkan juga berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis dari Majelis Hakim, dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya.

Pertimbangan yuridis dan sosiologis yang meringankan terdakwa yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:

a) Pertimbangan Yuridis (Hukum)

- 1) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
- 2) Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban

- 3) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar
- 4) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
- 5) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar
- 6) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
- 7) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain
- 8) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya
- 9) Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa

b) Pertimbangan Sosiologis (Praktek Peradilan)

- 1) Apakah tindak pidana yang dilakukan direncanakan atau tidak direncanakan sebelumnya
- 2) Latar belakang dilakukannya tindak pidana
- 3) Dampak tindak pidana terhadap korban
- 4) Tindak pidana tersebut merupakan pengulangan atau bukan
- 5) Tingkah laku terdakwa selama di dalam persidangan
- 6) Terdakwa belum pernah dihukum

VIII. Daftar Pustaka

Buku:

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*,
Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan
Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico,
Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Alkoholisme: paparan hukum dan
kriminologi* CV. Remadja karya, Bandung.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Liberty*, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor
86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang minuman keras.

Website:

<http://tugasfiles.blogspot.com/2014/02/makalah-miras-oplosan.html>.